

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*
TERHADAP EKSISTENSI KONVENSI DALAM SISTEM HUKUM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

Baharudin Yusuf

C75214009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Baharudin Yusuf
NIM : C75214009
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap
Eksistensi Konvensi Dalam Sistem Hukum
Ketatanegaraan di Indonesia

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 1 Agustus 2018
Saya yang menyatakan.


Baharudin Yusuf
NIM.C75214009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Baharudin Yusuf NIM C75214009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya 7 Juli 2018
Pembimbing,



Drs. Jeje Abd. Rozak, M. Ag
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Baharudin Yusuf, NIM: C75214009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Drs. Jeje Abd. Rozak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji II

Dr. Makinuddin, S.H., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji III,

M. Romdlon, S.H., M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, S.HLM.H
NIP. 198905172015031006

Surabaya 1 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Baharudin Yusuf
NIM : C75214009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Baharsamudra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP EKSISTENSI KONVENSI

DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Baharudin Yusuf)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap eksistensi konvensi dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia”. Skripsi ini tulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana eksistensi konvensi dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia? Bagaimana analisis *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap eksistensi konvensi dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konvensi merupakan salah satu hukum dasar yang tidak tertulis menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, konvensi ketatanegaraan berfungsi melengkapi, menyempurkan atau bahkan merubah dan menyatakan tidak berlaku substansi konstitusi tertulis (UUD 1945) sebagai norma hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktek bernegara, konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara. Praktek penyelenggaraan ketatanegaraan baik tertulis maupun tidak tertulis sejalan dengan sistem perundang-undangan dasar dalam hukum islam khususnya *'urf* (adat kebiasaan), selama praktek itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama atau melaksanakan larangan agama.

Sejalan dengan kesimpulan ini konvensi diharapkan dapat melengkapi atau memperbaiki ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang bersifat mendasar atau sebagai faktor pendinamisasi pelaksanaan konstitusi. Sehingga kehadiran konvensi mampu memperkaya khasanah keilmuan dan ketaatan bernegara. meskipun kendala utama dalam menerapkan konvensi tidak adanya sanksi yang mewajibkan lembaga-lembaga/ pejabat negara untuk senantiasa metuhi kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang berlaku. Pelanggaran terhadap konvensi ketatanegaraan tidak dapat dipaksakan oleh atau melalui pengadilan akan tetapi pelaksanaanya diharapkan tetap dapat dilaksanakan dan tidak dilanggar.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>FIQH SIYĀSAH</i> <i>DUSTURIYAH</i> DAN ' <i>Urf</i>	21
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
B. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dusturiyah</i>	25
C. Pengertian ' <i>Urf</i>	28
D. Landasan Hukum ' <i>Urf</i>	30
E. Syarat-syarat ' <i>Urf</i>	32

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dari obyek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan manusia. Banyak cabang ilmu yang kemudian menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum tata negara dan ilmu administrasi negara, yang semuanya menjadikan negara sebagai pusat perhatiannya.¹

Bicara mengenai ilmu Hukum Tata Negara (HTN), ada dua kata yang perlu mendapat penjelasan lebih dulu yaitu kata hukum dan kata Negara. Hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan. Hukum lahir untuk mengatur dan menyerasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota-anggota masyarakat. Sedangkan Negara adalah organisasi tertinggi satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 11

bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.²

Dapat dikatakan bahwa Hukum Tata Negara menurut Solly Lobis adalah seperangkat peraturan mengenai struktur pemerintah Negara, yakni peraturan-peraturan mengenai bentuk dan susunan Negara, alat-alat perlengkapannya, tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan itu.³

Ruang lingkup Hukum Tata Negara sendiri meliputi 4 objek kajian salah satunya adalah konstitusi, sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai perkembangan dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hirarki peraturan perundang-undangan, cakupan substansi ataupun muatan isinya sebagai hukum dasar yang tertulis.⁴

Lebih jelas konstitusi menurut Prof. Bagir Manan ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara, Sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan.⁵

Konstitusi memiliki fungsi yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie memperinci sebagai berikut :

² Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 71-73

³ Meksasi Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.13

⁴ Khaldan Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 9

⁵ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrohim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, cet.7, 1988), 64

6. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembal masyarakat.⁶
- Konstitusi Negara republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945,dalam arti luas Undang-Undang Dasar 1945 bukan dokumen hukum, melainkan juga mengandung aspek “non-hukum”. Seperti pandangan hidup, cita-cita moral, dasar filsafati, key religious, dan paham politik suatu bangsa. Melainkan juga tersed

dokumen hukum, melainkan juga mengandung aspek “non-hukum”. Seperti pandangan hidup, cita-cita moral, dasar filsafati, key religious, dan paham politik suatu bangsa. Melainkan juga tersed

Sebagai bentuk hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar
segala peraturan yang ada dalam ketatanegaraan haruslah bers

⁷ King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitsui*, (Bandung: Nusa Media, 2017), 11

2. Konvensi terjadi melalui kata sepakat diantara rakyat didalam suatu Negara dan mereka itu sepekat untuk melaksanakan suatu hal dengan cara-cara tertentu. Yang sekaligus pula menentukan tentang mekanisme pelaksanaannya. Hal-hal yang disepakitai tersebut, langsung menjadi konvensi yang terjadi ataupun tumbuh melaui suatu kebiasaan.¹³

Dengan hanya berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang terbatas dengan 37 pasal sebagai norma ketatanegaraan. Jelas dibutuhkan pedoman lain berupa kebiasaan ketatanegaraan atau Konvensi. Norma konvensi ketatanegaraan inilah yang lahir dan berkembang berdasarkan paham, ideology, dan sistem yang di anut Negara.

Kehadiran konvensi ini merupakan kebutuhan akan ketentuan-ketentuan yang melengkapi rangka dasar konstitusi. Karena sebagaimana disebutkan penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disamping undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis”.¹⁴

¹³ Parlin M. Mangunsong, *Konvensi Ketatanegaraan sebagai salah satu sarana pembela Undang-Undang Dasar*, (Bandung: Alumni, 1992), 49

¹⁴ Mura P. Hutagalung, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume Nomor 4, Oktober-Desember 1999, *Reformasi UUD 1945 Melalui Konvensi Ketatanegaraan*.

Jika dilihat ke dalam Hukum Islam, maka keberadaan Konvensi ketatanegaraan ini bisa dikaji ke ranah *fiqh siyāsah* yakni ilmu *fiqh siyāsah dustūrīyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁵

Sumber *fiqh siyāsah dustūrīyah* pertama adalah Al-Quran *al-Kārim* yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip

[illegible]

Adat kebiasaan sebagai sumber *fiqh dustūrīyah* biasa juga dikenal dengan istilah ‘*urf*. Kata ‘*urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. ‘*Urf* (tradisi) adalah

[illegible]

bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian. “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* terhadap Eksistensi Konvensi dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia”.

B. Identifikasi Dan Batasan Makalah

Penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa penting peranan konvensi ketatanegaraan dalam sistem dan praktek hukum ketatanegaraan di Indonesia.
2. Fungsi-fungsi konvensi ketatanegaraan dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.
3. Kedudukan konvensi ketatanegaraan sebagai salah satu bentuk konstitusi tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. Akibat atau dampak jika pelaksanaan konvensi ketatanegaraan di Indonesia tidak dijalankan.

¹⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416

- Pembahasan yang lebih spesifik dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu;

1. Eksistensi konvensi dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.
2. Tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap eksistensi konvensi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- [illegible]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal konvensi ketatanegaraan. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang juga membahas konvensi ketatanegaraan antara lain:

1. “Eksistensi konvensi sebagai sumber dan praktek ketatanegaraan di Indonesia” Jurnal yang di tulis oleh Tri Suhendra Arbani, dalam jurnal ini menjelaskan konvensi ketatanegaraan sebagai norma hukum konstitusi tidak tertulis yang berfungsi melengkapi, menyempurnakan, atau bahkan merubah dan menyatakan tidak berlakunya substansi konstitusi tertulis (UUD 1945) selain itu menjelaskan kedudukan dan fungsi konvensi ketatanegaraan sebagai sumber hukum tata negara dan praktek kenegaraan di dalam sebuah Negara.¹⁹
2. Jurnal kedua dari Weldy Agiwinata dalam judulnya “Konvensi ketatanegaraan sebagai batu uji dalam penguji Undang-Undang di

¹⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8

¹⁹ Tri Suhendra Arbani, *Jurnal, Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia*

Mahkamah Konstitusi”. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara normatif, penggunaan konvensi ketatanegaraan sebagai sumber hukum dan dasar hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dan menguraikan makna konvensi ketatanegaraan sebagai hukum yang tidak tertulis.²⁰

- ## H. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.

2.1. Sumber Primer

2.2. Sumber Sekunder

²⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 164-165.

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar dari ahli hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokokpermasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang

diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi.

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat landasan teori *fiqh siyāsah dustūrīyah*, pada bab ini akan diuraikan tentang teori *fiqh siyāsah dustūrīyah* meliputi definisi, ruang lingkup, dan pengertian ‘*Urf* atau adat kebiasaan (Konvensi).

Bab Tiga, memuat tentang eksistensi konvensi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Bab empat, memuat bab tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap eksistensi konvensi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan

TINJUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* DAN *URF'*

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-quran dan sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama oslam yang bersumber dari Al-quran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.¹

1 J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014), 24

sinonim dengan kata *dab'bara* yang berarti mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy fo government*).²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyāsah* adalah konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudhuran. Dalam bukunya Sayuthi Pulungan mendefinisikan :

sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fikih siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata Negara, dalam ilmu agama islam dikategorikan ke dalam pranata sosial islam.³

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup fikih siyasah, diantaranya ada yang menyebutkan ada 5 bidang, ada juga yang mengatakan 3 atau 4 bidang pembahasan bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi 8 bidang, tetapi perbedaan ini bukan suatu permasalahan karena hanya bersifat teknis.

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwasannya ruang lingkup *fiqh siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

1. *Siyāsah Dustūrīyyah*;
2. *Siyāsah Amalīyyah*;
3. *Siyāsah Qadha'īyyah*;

² Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.

³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 26.

4. *Siyāsah Harbiyyāh*;

5. *Siyasah Idariyyah*.⁴

Abdul Wahhab Khalaf membagi *fiqh siyāsah* dalam tiga bidang kajian antara lain, *Siyāsah Qadlaiyyah*, *Siyāsah Dauliyyah*, dan *Siyāsah Maliyyah*.

Pendapat lain dari para ulama juga disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan ruang lingkup *fiqh siyāsah* ada 4 yakni sebagai berikut :

1. *Siyāsah Qadlaiyyah*;
2. *Siyāsah Idarriyyah*;
3. *Siyāsah Maliyyah*, dan;
4. *Siyāsah Dauliyyah atau Khāwarīyyah*.⁵

T.M Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang antara lain :

1. *Siyāsah Dusturiyyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
2. *Siyāsah Tasyri'iyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
3. *Siyāsah Qadlaiyyah* (Kebijaksanaan Peradilan);
4. *Siyāsah Maliyyah Shari'iyah* (Ekonomi dan moneter);
5. *Siyāsah Idariyyah Shar'iyah* (Administrasi Negara);

⁴ Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara...*, 14.

⁵ Ibid, 15

6. *Siyāsah Dauliyyah/ siyāsah Khārijīyyah* (Hubungan luar negeri atau Internasional);
7. *Siyāsah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang);
8. *Siyāsah Harbiyyah* (Politik Peperangan)/

Beberapa pembagian mengenai Ruang lingkup *Fiqh siyāsah* yang dikemukakan para ulama maka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, antara lain⁶ :

1. *Siyāsah Dustūriyyah*, disebut juga politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum dan *tasyrī'yyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadlaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idāriyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyāsah Dauliyyah*, disebut juga dengan politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyāsah Harbiyyah*, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
3. *Siyāsah Māliyyah*, disebut juga politik keuangan atau moneter, bagian ini membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran

⁶ Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara...*, 15-16.

dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Pembahasan mengenai Konvensi ketatanegaraan dan Hukum tata negara jika dikaitkan dengan hukum islam atau ruang lingkup *fiqh siyāsah* maka akan dibahas lebih khusus di *fiqh siyāsah dusturiyah*, yaitu tentang Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan

B. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Kata “*Dustur*” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁷

Sedangkan kata “*Dustur*” dalam bahasa inggris disebut juga dengan *Constitution* atau Undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Kata dasar dalam bahasa Indonesia ini tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *Dustur*.

⁷ Ibid, 22

Siyāsah dustūriyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸

Siyāsah dustūriyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Siyāsah dustūriyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh siyāsah dustūriyah* dibagi menjadi 4, antara lain⁹ :

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi...*, 177.

⁹ Imam Amrusi Jailani,et al, *Hukum Tata Negara...*, 48.

- idariyah*, termasuk di
kepegawaian.

umber fikih dusturi pertama adalah Al-Quran al-
g berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan
1 *kulliy* dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemud
dis yang berhubungan dengan imamah, dan

C. Pengertian '*Urf*

‘Urf secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam

¹¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416

pengertian lain.¹² Sedangkan menurut Abdul-Karim Zaidan, *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

'Urf ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

“apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.¹³

Dapat disimpulkan pengertian *'urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. Dari beberapa definisi di atas,

¹² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209

¹³ Abu Zahro, *op.cit*, 147

dapat disimpulkan pengertian '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama *ushul fiqh* membedakan adat dan '*urf*' sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.

D. Landasan Hukum '*Urf*'

Landasan syariah berupa Al-Qur'an, hadits serta kaidah fikih yang berkaitan dengan maslaah akan di uraikan secara terperinci, jumhur ulama dalam menetapkan maslaah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan :

1. Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan '*urf*' disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu

a. Surat al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Melalui ayat di atas, Allah SWT. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.¹⁴

b. Surat al-Hajj (22) ayat 78:

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ عَلَيَّكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.

Al-Haraj pada ayat diatas berarti kesempitan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi oleh hamba-Nya dengan kebesaran-Nya. Hal ini menunjukan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam hal ibadah maupun bermuamalah.

2. Hadits

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 212.

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum ‘*urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:

فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

E. Syarat-Syarat ‘*Urf*

Syarat-syarat ‘*Urf* yang bisa diterima oleh hukum islam, antara lain¹⁶ :

1. ‘*Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘*urf* yang sah sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 212.

¹⁶ A.Djazuli, Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 89.

F. Macam-macam 'Urf

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 40

Ulama *ushul fiqh* membagi ‘*Urf*’ menjadi tiga macam:

- a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'urf al-lafdzi*), adalah Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu
- b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*) kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

- a. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-'am*)

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 210.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123

Maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Para ulama sepakat, bahwa *'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena ini, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum islam pada masyarakat, sebaliknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah kebiasaan yang bertentangan dengan kebiasaan

G. Kedudukan 'Urf

Syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *‘urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara’*. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak

‘Urf Shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara’, maka wajib diperhatikan.

Hukum yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.”²³

23 *ibid*

TINJUAN UMUM TENTANG EKSISTENSI KONVENSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Istilah konvensi pertama kali dipergunakan oleh A.V. Dicey yaitu *the convention of constitution* (Konvensi Konstitusi) yang dihadapkan dengan sebutan *the law of constitution* (Hukum Konstitusi). Dalam bahasa Indonesia, disamping istilah konvensi dijumpai juga dengan istilah lain yaitu : Hukum adat ketatanegaraan, kebiasaan ketatanegaraan.¹

Lebih lanjut menurut K.C. Wheare menyatakan bahwa konvensi terbentuk dengan dua cara :

- ¹ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), 45

2. Konvensi terjadi melalui kesepakatan (*agreement*) dikalangan rakyat sendiri. Mereka sepakat melaksanakan sesuatu dengan cara-cara tertentu dan sekaligus menetapkan ketentuan mengenai cara-cara pelaksanaannya.²

1. Keyakinan hukum dalam arti materiil, yaitu suatu keyakinan bahwa hukum atau suatu aturan itu memuat hukum yang baik. Jadi yang dilihat isinya, tentang baik tidaknya isi peraturan;
2. Keyakinan hukum dalam arti formal, yaitu orang yakin bahwa aturan itu harus diikuti dengan taat dan dengan tidak mengingat akan nilai daripada isi aturannya.

² Kheldan Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 61

[illegible]

perundang-undangan lain yang berada dibawah UUD Tahun 1945. Artinya peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 harus bersumber dan berdasar pada UUD 1945 baik dari aspek prosedurnya maupun dalam hal materi muatan yang tidak dapat bertentangan dengan materi muatan UUD 1945. Adapun kelompok hierarki norma hukum di Indonesia⁶ :

1. Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR), dan Konvensi Ketatanegaraan
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pelaksana dan Peraturaturan Otonom

Peraturan perundang-undangan dalam sistematika hukum merupakan bagian utama dari hukum tertulis dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

Sejarah hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dan dilatarbelakangi oleh Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

⁶ Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 171.

Pembaharuan hierarki peraturan perundang-undangan tidak hanya berhenti pada UU Nomor 10 Tahun 2004, pada 12 Agustus 2011 UU Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku dengan munculnya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

[illegible]

Hal tersebut harus sesuai dengan norma yang mengakibatkan timbulnya hukum kebiasaan atau konvensi maka diperlukan syarat-syarat tertentu yaitu :

- [illegible]

[illegible]

Indonesia yang pertama (Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI), dan pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Pusat yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara dari Lembaga Tertinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya.

Dalam melaksanakan pekerjaan pemerintah Presiden dibantu oleh sebuah badan yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang tercantun pada peraturan dalam undang-undang dasar terkait dengan pasal IV tentang aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi :

"Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional."

Sesuai dengan ketentuan dalam aturan pemerintah Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dibentuk sebuah Komite Nasional yang tugasnya

⁸ Deliar Noer dan Akbarsyah, *Komite Nasional Indonesia (KNIP) Parlemen Indonesia 1945-1950*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2005), 16

membantu pekerjaan presiden. Keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat sendiri diambil dari beberapa anggota dari PPKI. KNIP dilantik dan diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) ini diakui merupakan cikal bakal dari badan legislatif di Indonesia.⁹

Mengingat pada awal kemerdekaan keadaan dan situasi Negara Indonesia pada saat itu belum begitu aman dan melihat dari Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 ditentukan dalam keputusan baru. Keadaan Indonesia yang tidak tenang mengakibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) belum dapat dibentuk. Inilah yang menjadi masalah bagi bangsa Indonesia yang menganggap Indonesia menjadi negara diktator dan sekaligus berlawanan dengan kehendak rakyat yang ingin pemerintahan demokratis. Usaha tersebut mengkristal pada tanggal 7 Oktober 1945 dengan lahirnya memorandum yang ditanda tangani oleh 50 orang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan isi¹⁰:

1. Mendesak Presiden agar menggunakan kekuasaan istimewanya untuk segera membentuk MPR.

⁹ Ibid., 16.

¹⁰ Yusmaliana dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 45-49.

2. Sebelum MPR terbentuk hendaknya anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diberi kewenangan untuk melakukan fungsi dan tugas MPR

Untuk itu akhirnya pada 16 Oktober 1945 muncul Maklumat Wakil Presiden Moh. Hatta, yang dikenal dengan Maklumat Nomor X. Maklumat ini sebenarnya hanya berisi perubahan atas ketentuan pasal IV Aturan Peralihan yang awalnya ialah menempatkan KNIP sebagai pembantu Presiden yang dibahas dalam rapat persiapan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang melahirkan kesepakatan¹¹ :

1. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945.
2. Memilih Presiden Republik Indonesia.
3. Menetapkan bahwa pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional.

Maklumat ini akhirnya menimbulkan perdebatan, apakah Maklumat ini merupakan Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan (*agreement*) atau penyimpangan terhadap Konstitusi Indonesia (UUD 1945). Sidang II Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 16-17 Oktober 1945 di Jakarta, Sutan Sjahrir dan kawan-kawan mengajukan usul kepada pemerintah

¹¹ Jajang Indra Fadila, "Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia", Cita Hukum, Vol. I, No. 1 (Juni 2014), 139.

mengenai perubahan kedudukan dan tugas KNIP. Isi usul yang pada hakikatnya mengubah ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 :¹²

- a. Sebelum terbentuk MPR dan DPR, Komite Nasional Indonesia Pusat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara.
- b. Berhubungan dengan gentingnya keadaan, pekerjaan sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara dan bertanggung jawab kepada KNIP.

Kehidupan negara baru yang pondasi bangunannya belum kokoh ditambah keadaan dan situasi revolusi itu menghendaki tindakan serba cepat, sementara sarana penunjang di segala bidang masih belum memadai dan mengandalkan improvisasi.¹³

Perubahan ini KNIP tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara pembantu Presiden tetapi menjadi lembaga negara yang sejajar dengan kedudukan lembaga kepresidenan. KNIP sejak itu menjadi lembaga legislatif yang bersama-sama Presiden membuat undang-undang (tugas DPR), menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN), Seperti kita ketahui UUD 1945 menganut sistem kabinet presidensiil, di mana presiden

¹² Tri Suhendra Arbani, Jurnal, *Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia*, Vol 5, No. 1, Juni 2016, 126

¹³ Ibid., 127.

Selanjutnya pada masa pemerintahan presiden Soeharto (orde baru), Undang-Undang Dasar 1945 masih disertai dengan “penjelasan”. penjelasan mempunyai kedudukan yang sebanding dengan batang tubuh. Melalui buku-buku panduan “Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4)” ditanamkan bahwa Undang-Undang 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pada masa itu, tidak jarang praktek ketetaneagaan bersumber dari penjelasan, bukan dari batangtubuh Undang-Undang Dasar. Misalnya mengenai prinsip negara berdasarkan atas hukum, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Prinsip-prinsip penting ini memang tidak dimuat dalam batang tubuh, walaupun sesungguhnya, dari bunyi pasal-pasal dalam batang tubuh secara asasi memuat prinsip-prinsip tersebut. Batang tubuh UndangUndang Dasar 1945 didapati ketentuan

[illegible]

mengenai “kedaulatan ada di tangan rakyat” hal ini berarti bentuk dari demokrasi.¹⁵

Selanjutnya selama empat tahun (1999-2002), Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah secara resmi (formal amendment) sebanyak empat kali. Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menindaklanjuti hasil kerja Komisi Konstitusi, maka ada kemungkinan perubahan-perubahan masih akan berlanjut, termasuk mengubah kembali hasil perubahan itu sendiri, perubahan-perubahan tersebut telah "melahirkan" Undang-Undang Dasar 1945 baru.¹⁶

Dengan demikian Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka dalam menjalankan Ketatanegaraan Republik Indonesia tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Konstitusi tertulis tetapi juga harus memperhatikan Konstitusi yang tidak tertulis (konvensi ketatanegaraan).

Di Indonesia ada beberapa aspek yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebabkan Konstitusi ini tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis dan menegakkan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut¹⁷ :

¹⁵ Ibid., 116.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid, 117.

1. Undang-Undang Dasar 1945 terlampau sedikit jumlah pasal dan ayatnya, hanya terdiri dari 37 pasal sehingga belum/tidak mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa di dalamnya yang makin lama makin kompleks;
2. Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham Supremasi MPR yang menyebabkan tidak ada sistem *checks and balances* (Sistem pengawasan dan keseimbangan) antar cabang kekuasaan Negara;
3. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden (*executive heavy*) sehingga peranan Presiden sangat besar dalam penyelenggaraan Negara;
4. Beberapa muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengandung potensi multitafsir yang membuka peluang penafsiran yang menguntungkan pihak penguasa;
5. Undang-Undang Dasar 1945 sangat mempercayakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 kepada semangat penyelenggara Negara.

Menjalankan roda pemerintahan secara baik akan sulit untuk dicapai jika hanya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat terbatas karena hanya memuat 37 pasal dan muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengandung potensi multitafsir yang membuka peluang penafsiran yang menguntungkan pihak penguasa, sebagai norma dasar ketatanegaraan. Untuk itu diperlukan pedoman lain berupa kebiasaan ketatanegaraan,

yang telah dilakukan sebagai pendamping norma hukum dasar yang tertulis. Norma hukum kebiasaan ketatanegaraan ini lahir dan berkembang berdasarkan paham, ideologi, dan sistem yang dianut oleh suatu negara, sehingga berbeda dengan negara lain.¹⁸

B. Produk-produk Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia

Sampai saat ini sudah banyak konvensi ketatanegaraan yang dilakukan dalam prakteknya penyelenggaraan Indonesia baik Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat kebiasaan ketatanegaraan (*costum*) maupun Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan (*aggrement*). Berikut adalah contoh-contoh konvensi yang pernah timbul dan konvensi yang masih terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara Indonesia :

1. Praktik di Lembaga Tertinggi Negara bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mengenai pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa "segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak". Pasal ini tidak menyebutkan bentuk pelaksanaan untuk mendapatkan suara terbanyak tersebut, melalui Musyawarah atau Voting.
2. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR yang di satu pihak memberi laporan pelaksanaan tugas pemerintah dalam

¹⁸ Ibid, 117

- [illegible]

dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak
sudah berulang kali dilakukan pada masa pemerintahan C

5. Pada setiap minggu pertama bulan Januari, Presiden R
selalu menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara d
perbuatan presiden tersebut termasuk dalam konvensi.
diatur dalam UUD 1945, dalam pasal 23 ayat 1 U
disebutkan bahwa "Anggaran pendapatan dan belanja di
tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwak
menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, m
menjalankan anggaran tahun lalu". Penjelasan oleh P

6. Adanya Menteri Negara Non-departemen dalam praktik ketatanegaraan di bawah Pemerintahan Orde Baru. Pasal 17 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa : "menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan". Jika ditinjau dari ketentuan Pasal 17 ayat 3 UUD 1945, maka menteri-menteri itu harus memimpin Departemen. Namun demikian dalam praktik ketatanegaraan di masa orde baru dengan kabinet yang dikenal kabinet pembangunan, komposisi menteri dalam tiap-tiap periode kabinet pembangunan di samping ada menteri yang memimpin departemen, terdapat juga menteri negara nondepartemen. Adanya menteri Nondepartemen berkaitan dengan kebutuhan pada era pembangunan dewasa ini. Karena adanya menteri negara nondepartemen sudah berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, maka dapatlah dipandang sebagai konvensi dalam ketatanegaraan kita dewasa ini. Tidaklah dapat diartikan bahwa adanya menteri negara nondepartemen mengubah UUD 1945. Karena barulah terjadi perubahan terhadap UUD 1945 apabila prinsip-prinsip konstitusional yang dianut telah bergeser, misalnya menteri-menteri kedudukannya tidak lagi tergantung presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Dalam hal ini misalnya menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada DPR dan kedudukannya tergantung DPR.

7. Syarat Presiden orang Indonesia asli, praktik ketatanegaraan Indonesia selama 72 tahun setelah merdeka, menunjukkan presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dalam artian bumiputera. Sebut saja Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, termasuk juga para Wakil Presiden yaitu Mohammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Tri Sutrisno, BJ Habibie, Megawati, Hamzah Haz, Jusuf Kalla dan Budiono. Dengan demikian dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dapat dikatakan warga negara “keturunan” belum pernah menjabat sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. Praktik tersebut adalah sebuah konvensi alias kebiasaan ketatanegaraan.¹⁹
8. Menurut Bagir Manan salah satu Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia adalah agama yang dianut Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah Islam. Menurut Bagir Manan :

Praktik Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beragama Islam tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sebab menurut UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dengan suara terbanyak baik melalui musyawarah mufakat di MPR (UUD 1945 Sebelum Perubahan) maupun melalui pemilihan umum (UUD NRI Tahun 1945 Setelah Perubahan), sehingga dengan memperhatikan mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam akan sulit bagi calon yang tidak beragama Islam akan memenangkan pemilihan.²⁰

¹⁹ Mei Susanto, “Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan”, JIKH Vol. 11 No. 2 (Juli, 2017), 201.

²⁰ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*,..., 107

- ### C. Konvensi sebagai Materi Batu Uji Mahkamah Konstitusi

Salah satu fungsi dari konvensi ketatanegaraan adalah sebagai pelengkap dan penyempurna dari konstitusi. Konvensi juga dapat digunakan sebagai batu uji dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut contoh konvensi yang berubah menjadi peraturan tertulis adalah :

- [illegible]

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”²²

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut: “Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang 42 tahun 2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya seringkali menitik

²² Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD”.

Pengalaman yang telah berjalan ialah pemilu Presiden dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain.

[illegible]

ANALISIS TINJUAN FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP EKSISTENSI KONVENSI KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Konvensi yang ada di Indonesia mempunyai kedudukan yang penting, hal ini dapat dilihat setelah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merupakan negara yang merdeka. Sehari setelah kemerdekaan tersebut, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan pula Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis Negara Republik Indonesia. Sejak ditetapkannya UUD 1945 sebagai norma hukum dasar tertinggi, hingga saat ini tentunya telah banyak pula konvensi ketatanegaraan yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan Indonesia baik konvensi ketatanegaraan yang bersifat kebiasaan ketatanegaraan (*costum*) maupun Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan (*aggrement*)

Konvensi ketatanegaraan merupakan salah satu sumber hukum formil dalam hukum tata negara. Bahkan UUD 1945 sebelum perubahan melalui buku-buku panduan “pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila (P4)”, di dalam Penjelasannya menguraikan:

“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang ialah hukum dasar yang tertulis sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang

- [illegible]

bertanggungjawab. Untuk itu dalam era reformasi hingga sekarang ini pertumbuhan hukum dasar tidak tertulis dibidang ketatanegaraan ini perlu mendapat perhatian dan tempat yang wajar karena Konvensi Ketatanegaraan adalah bagian dari konstitusi kenegaraan Indonesia yang juga diakui oleh negara-negara lain pada umunya.

Eksistensi konvensi ketatanegaraan juga berada dalam sistem tata hukum perundang-undangan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, bukan hanya sebagai pendamping dari Konstitusi tertulis UUD 1945, tetapi konvensi juga hadir sebagai pelengkap atau penyempurna dari peraturan perundang-undangan yang lain.

Pelajaran negara maju yang mapan secara politik, demokrasi dan pemerintahannya, pentaatan terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam arti konvensi ketatanegaraan sangatlah tinggi. Karena itu, sangatlah penting menanamkan sikap etis para pelaku pemerintahan dan rakyat terhadap hal tersebut. Selain itu, konvensi ketatanegaraan akan dapat ditaati dan diikuti secara baik jika kemampuan publik untuk bersikap dan menyatakan sikap atas kegiatan pemerintahan dan politik. Disini diperlukan rakyat yang terdidik dan kritis terhadap setiap aktivitas pemerintahan dan politik. Karena, rakyat yang kurang terdidik, akan sulit diajak untuk menjadi

pengawas agar para penyelenggara negara senantiasa menjaga nilai-nilai etika dalam pemerintahan dan politik.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah dustūriyah* Terhadap Eksistensi Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia

Konvensi ketatanegaraan dapat diartikan sebagai segenap kebiasaan atau tindakan ketatanegaraan yang bersifat mendasar (dengan materi muatan konstitusi), yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, baik yang belum diatur maupun yang mungkin menyimpang dari undang-undang dasar (konstitusi) dan peraturan ketatanegaraan lain, dengan maksud untuk melengkapi atau memperbaiki ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang bersifat mendasar atau sebagai faktor pendinamisasi pelaksanaan konstitusi.

Fungsi konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan negara dapat berupa:

1. melengkapi/menambah atau mengurangi makna, serta mendinamisasi pelaksanaan undang-undang dasar;
2. mengisi kekosongan aturan-aturan ketatanegaraan lainnya;
3. mengefektifkan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara sesuai dengan kebutuhan perkembangan;
4. dan memperlancar jalannya roda penyelenggaraan Negara.

Meskipun konvensi ketatanegaraan bukan hukum yang mengikat, tetapi ada alasan tertentu kenapa Konvensi harus di taati salah satunya karena setiap pelanggaran akan membawa atau berakibat pelanggaran terhadap kaidah hukum, dan juga berpengaruh pendapat umum (*public opinion*). Pelanggaran terhadap konvensi akan menimbulkan reaksi umum masyarakat hilangnya dukungan masyarakat kepada pemerintahan.

Sedangkan *‘urf* dari terminologi adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu. *‘urf* terdiri dari dua bentuk yaitu *al-‘urf al-qāuli* (Kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-‘urf al-fī-il* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).²

‘*Urf* dalam segi keabsahannya dibagi menjadi dua bagian yaitu *al-‘urf ash-Shāhihah* (‘*Urf* yang abash atau tidak bertentangan dengan aturan-

[illegible]

Sebagai adat kebiasaan '*urf*' dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan tersebut. Kaidah ini sangat penting dipahami oleh masyarakat maupun pegiat hukum islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama islam tetaplah relevan untuk semua waktu dan tempat.

1. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum;
2. Hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal
3. yang baik itu menjadi 'urf sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat.

[illegible]

Dengan demikian konvensi ketatanegaraan dengan *fiqh siyāsah dustūrīyah* khususnya kaidah *fiqh ‘urf* saling berkaitan dan sama.

Jika konvensi ketatanegaraan adalah sumber formil dari Sumber Hukum Tata Negara sedangkan *‘urf* adalah sumber dari *fiqh siyāsah dustūrīyah* (Konstitusi). Keduanya menjadi hal penting yang tak bisa ditinggalkan dalam sistem perundang-undangan dan tata Negara.

Hal ini juga diperkuat dengan bahwasanya *fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah *fiqh siyāsah* yang membahas masalah ketatanegaraan salah satunya perundang-undangan atau konstitusi. hal ini juga membuktikan bahwa ajaran agama islam tidak hanya mengajarkan bagaimana umat manusia berhubungan dengan tuhan nya tetapi juga bagaimana umat manusia dalam hal ini umat muslim bernegara.

Konvensi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan hukum tata Negara di Indonesia, dikarenakan konvensi adalah kebiasaan yang timbul dalam praktek tata Negara, selain itu juga konvensi ada sebagai pelengkap atau penyempurna dari Konstitusi di Indonesia, begitupun juga dengan *‘urf* yang dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum islam dan juga hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut antara lain Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

'Urf mendapat kesepakatan antar para pelaku pelakunya, 'urf dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah. Islam hadir tidak sedang memusnahkan 'urf yang tumbuh-berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan menyeleksi 'urf yang ada: jika tidak bertentangan dengan Islam maka 'urf terus berjalan. Sebaliknya, jika bertentangan, Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

penyelenggaraan negara selama ini ada berbagai k
kembangkan menjadi konvensi ketatanegaraan.
aspek tersebut sebagai konvensi ketatanegaraan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Konvensi ketatanegaraan merupakan salah satu hukum dasar yang tidak tertulis menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Ketatanegaraan berfungsi melengkapi, menyempurkan atau bahkan merubah dan menyatakan tidak berlaku substansi Konstitusi tertulis (UUD 1945) sebagai norma hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktek bernegara, konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara.
2. Praktek penyelenggaran ketatanegaraan baik tertulis maupun tidak tertulis sejalan dengan sistem perundang-undangan dasar dalam hukum islam khususnya '*Urf*', selama praktek itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama atau melaksanakan larangan agama.

Diharapkan konvensi diharapkan dapat melengkapi atau memperbaiki ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang bersifat mendasar atau sebagai faktor pendinamisasi pelaksanaan konstitusi. Sehingga kehadiran konvensi mampu memperkaya khasanah keilmuan dan ketaatan bernegara, meskipun kendala utama dalam menerapkan konvensi tidak adanya sangsi yang mewajibkan lembaga-lembaga/ pejabat negara untuk senantiasa metuhi kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang berlaku. Pelanggaran terhadap konvensi ketatanegaraan tidak dapat dipaksakan oleh atau melalui pengadilan akan tetapi pelaksanaanya diharapkan tetap dapat dilaksanakan dan tidak dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agiwinata Weldy, Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, Jurnal, Yuridika , *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*.
- Amrusi Jailani Imam, dkk, 2011, Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: IAIN Press
- Arbani Tri Suhendra, Vol. 5, No. 1, Juni 2016, Jurnal, *Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia*.
- Asshiddiqie Jimly, 2002, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara fakultas hukum universitas Indonesia.
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- Ayunita Kheldan dan Asman Abd. Rais, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Djalil A. Basiq, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Djazuli A. Basiq, 2004, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*, Jakarta: Kencana.
- Fadila Jajang Indra, Vol. I, No. 1 (Juni 2014), Cita Hukum, *Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia*.
- Hutagalung Mura P, Volume Nomor 4, Oktober-Desember 1999, Jurnal Hukum dan Pembangunan, *Reformasi UUD 1945 Melalui Konvensi Ketatanegaraan*.
- Indra Mexsasi, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Iqbal Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.

